



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pertahanan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI) dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Republik Indonesia dan Kementerian Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence</i>), dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence</i>).
Hari, Tanggal	:	Selasa, 4 Desember 2018
Pukul	:	11.00 WIB – 13.28 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	Asril Hamzah Tanjung, S.IP.
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	:	<u>Sesi I, Pembahasan Tingkat I:</u> 1. Pembukaan; 2. Keterangan Penjelasan Pemerintah; 3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi; 4. Pembahasan Materi DIM RUU dan DIM Penjelasan. <u>Sesi II, Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan:</u> 1. Pembacaan Naskah Akhir RUU dan Penjelasan; 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi; 3. Pendapat Akhir Pemerintah; 4. Pengambilan Keputusan Terhadap RUU dan Penjelasan; 5. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan; 6. Penutup.
Hadir	:	PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan) 3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)

5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
8. Andreas Hugo Pareira
9. Junico BP Siahaan
10. Yadi Srimulyadi
11. Drs. Ahmad Basarah, MH

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

12. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
13. Bambang Atmanto Wiyogo, S.E.
14. Venny Devianti, S. Sos.
15. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

16. H. Ahmad Muzani
17. Martin Hutabarat
18. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
19. Rachel Maryam Sayidina
20. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
21. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

22. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
23. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A
24. Ir. Hari Kartana, M.M.
25. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

26. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
27. Ir. Alimin Abdullah

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

28. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
29. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
30. Arvin Hakim Thoha
31. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag
32. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

33. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

34. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
35. Dra. Hj. Lena Maryana

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

36. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
37. Prananda Surya Paloh
38. Drs. Y. Jacki Uly, M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

39. Drs. Timbul P. Manurung

- Anggota yang Izin :
1. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDI Perjuangan)
 2. Charles Honoris (F-PDI Perjuangan)
 3. Meutya Viada Hafid (F-PG)
 4. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. (F-PG)
 5. Dr. Jerry Sambuaga (F-PG)
 6. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-GEINDRA)
 7. H. Darizal Basir (F-PD)
 8. Budi Youyastri (F-PAN)
 9. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN)
 10. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
 11. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS)
 12. Moh. Arwani Thomafi (F-PPP)
 13. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM)
- Undangan :
1. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja.
 3. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc.
 4. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara S., M.Si.
 5. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nakir, S.IP., M.H.,
 6. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A.
 7. Direktur Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Bunyamin.
- Beserta jajarannya.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Selamat datang Pak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Ryamizard Ryacudu, mewakili Menteri Luar Negeri, mewakili Menteri Hukum dan HAM, ada Dirjen Perundang-Undangan Bapak Prof. Widodo dan juga Bapak Sekjen dan perwira lainnya di lingkungan Kemenhan, Bapak dan Ibu sekalian Anggota Komisi I DPR RI.

Saya rasa sudah kuorum Pak, dari 10 Fraksi yang ada kita sudah 7 atau 8 jadi sudah kuorum sambil yang lainnya nanti berjalan. Karena beberapa Pimpinan Komisi sedang bertugas keluar Pak. Jadi sesuai dengan Tata Tertib kami tanyakan kepada Bapak Menteri karena rapatnya ini apa kita terbuka atau tertutup, karena hanya merencanakan atau membicarakan mengenai ratifikasi Rancangan Undang-Undang saja.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Terbuka saja Pak.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih.

Dengan demikian Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dalam hal dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan. Yang kedua, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan. Selasa, 4 Desember 2018 kita nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)

Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan.

Di dalam Anggota Komisi juga silih berganti Pak, kadang-kadang ada serah terima dan lain-lain. Hari ini ada satu Anggota Komisi I DPR RI yang baru dari Partai Hanura yang tadinya Bapak Arief sudah pindah, sekarang ada satu yang namanya Drs. Timbul P. Manurung.

Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah hari ini dilaksanakan dalam dua agenda tadi Pak, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan. Yang kedua, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan.

Oleh karenanya, dapat kami sampaikan bahwa Presiden RI telah mengirim surat kepada DPR RI, yaitu surat nomor 27/Pres/05/2018 dan surat nomor 28/Pres/5/2018 tanggal 28 Mei 2018, perihal RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja

sama di bidang Pertahanan dan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan. Serta menugaskan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut.

Surat Presiden tersebut selanjutnya telah dibahas dalam rangka konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 2 Juli 2018. Selanjutnya Rapat Konsultasi memutuskan menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas kedua RUU tersebut.

Menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tersebut, Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 21 November 2018 memutuskan untuk segera melaksanakan pembahasan terhadap kedua RUU tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2018, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar dan akademisi dalam rangka mendapat masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan dan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan.

Dapat kami sampaikan bahwa agenda Raker kita pada hari ini akan kita bagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama setelah ini adalah penjelasan Pemerintah, kemudian dilanjutkan nanti pemandangan umum Fraksi-Fraksi yang ada di Komisi I DPR RI ini. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban Pemerintah tentang pandangan umum Fraksi-Fraksi ini. Kemudian pembahasan materi DIM RUU dan penjelasannya.

Setelah ini baru masuk sesi kedua, pendapat akhir mini Fraksi, jadi ada dua kali nanti ini perwakilan Fraksi-Fraksi menyampaikan pendapatnya. Kemudian dilanjutkan pendapat akhir Pemerintah. Pengambilan keputusan terhadap RUU dan penjelasannya. Terakhir nanti penandatanganan naskah RUU dan penjelasan antara Anggota Komisi I DPR RI dengan Bapak Menteri dan dua Menteri terkait lainnya, Menlu dan Menkumham.

Baik kita masuk ke sesi pertama, yaitu penjelasan Pemerintah kami persilakan yang terhormat Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menteri Pertahanan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan kedua RUU ini, terutama RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan dan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan.

Silakan Bapak Menteri.

F-PPP (Dra. Hj. LENA MARYANA):

Interupsi Bapak Pimpinan.

Lena Maryana dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nomor A-513 Dapil DKI Jakarta II, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri. Karena hari ini kita tidak melaksanakan sidang Paripurna maka dalam sidang Komisi sebelum kita memulai agenda yang sudah dibacakan oleh Pimpinan. Kami Fraksi PPP ingin menyatakan duka cita yang amat dalam atas wafatnya 31 pekerja di Nduga dan mudah-mudahan kami mendengar bahwa sampai hari ini belum dapat dievakuasi. Berharap Pemerintah melakukan tindakan segera untuk melakukan evakuasi terhadap korban dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Dan kami sudah mendoakan semoga seluruh arwah para korban yang 31 orang ini menjadi shahid, mati dalam keadaan shahid dan meninggal dalam keadaan shahid karena sedang melaksanakan program pembangunan yang digagas atau yang dilakukan oleh Pemerintah.

Itu saja Bapak Pimpinan, karena sayang sekali kita tidak Paripurna hari ini sehingga kami mengambil kesempatan pada Rapat Komisi ini untuk menyatakan belasungkawa yang amat dalam atas wafatnya 31 pekerja tersebut.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Ibu Hj. Lena Maryana dari PPP.

Memang Pak, ini kesempatan yang pas karena yang hadir disini adalah unsur Pemerintah apalagi Menhan. Memang kita terguncang dengan gugurnya 31 pekerja di Papua ini. Ini mungkin menjadi catatan kita ya, ini yang kita maksud.

Terima kasih Ibu Lena, kita diingatkan.

Selanjutnya kita lanjutkan acara tadi.

Silakan Bapak Menteri.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang saya hormati yang mewakili Menteri Luar Negeri,**

**Dan yang saya hormati juga yang mewakili Menteri Hukum dan HAM,
Hadirin yang berbahagia.**

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka penyampaian keterangan Pemerintah atas dua Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu:

1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan.
2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan.

Kita ketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut telah disampaikan Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat tanggal 28 Mei 2018. Di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut di DPR RI.

Pada kesempatan ini, kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan keterangan Pemerintah atas dua Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan, yang telah dikirimkan oleh Pemerintah untuk dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ancaman teroris telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara.

Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol dalam bidang pertahanan telah di mulai sejak tahun 1976. Pada tahun 1980 telah dilakukan kerja sama pada bidang industry strategis seperti pesawat terbang, yaitu memproduksi pesawat angkut CN235. Pada bulan Desember 2012 dilakukan kerja sama pertahanan pengadaan alat utama system pertahanan atau alutsista antara PT. Dirgantara Indonesia dengan *Airbus Military* Spanyol berupa dua unit pesawat CN295 buatan airbus militer untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Kerja sama tersebut kemudian berlanjut dengan pembaharuan MoU antar PT. Dirgantara Indonesia dengan *Airbus Defend on Space* pada tahun 2013.

Mendasarkan pada hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama dibidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013. Beberapa bagian penting kerja sama dibidang pertahanan dalam nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Pemerintah Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol meliputi pertukaran kunjungan pejabat, pertukaran informasi bidang pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, serta bidang lainnya yang disepakati bersama.

Sementara kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia telah terjalin dengan baik dalam bidang perdagangan komoditas ekspor utama Republik Indonesia ke Republik Serbia meliputi alat komunikasi, hasil laut, konveksi dan hasil perkebunan. Komoditas impor utama Indonesia dan Republik Serbia adalah amunisi dan senjata serta peralatan medis. Dalam konteks pertahanan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia masih terbatas di bidang pembelian dan pemeliharaan alat utama system pertahanan. Kerja sama dibidang pertahanan dalam rangka meningkatkan kemandirian industry pertahanan, pertukaran pendidikan, dan pelatihan.

Mendasarkan pada hubungan yang baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Serbia yang telah ditandatangani di Jakarta pada 13 September 2011. Beberapa bagian penting kerja sama di bidang pertahanan dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia meliputi kebijakan strategis bidang pertahanan, kerja sama dukungan bidang logistik dan industry pertahanan. Pendidikan dan pelatihan serta kerja sama atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten.

Hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk kunjungan pejabat, dialog strategis bidang pertahanan, pertukaran intelijen, pertukaran pengalaman, dan program pelatihan dan pendidikan, konferensi, symposium, dan seminar, pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industry pertahanan serta bentuk lain yang disepakati. Dalam rangka kerja sama tersebut diatas bentuk komite bersama.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dalam bentuk Undang-Undang yang akan dijadikan dasar hukum dalam setiap pelaksanaan kerja sama di bidang pertahanan antar kedua negara.

Demikian keterangan Pemerintah terhadap dua Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Selanjutnya kami berharap kiranya Rancangan Undang-Undang ini dapat segera

dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI. Sesuai ketentuan berlaku dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, aaminn.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 4 Desember 2018

Atas nama Presiden Republik Indonesia

Menteri Pertahanan Republik Indonesia

Ryamizard Ryacudu.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan.

Kita masuk acara selanjutnya pemandangan umum Fraksi-Fraksi yang ada di Komisi I DPR RI terutama. Mungkin pertama dari Fraksi PDI Perjuangan sudah ada? Pak Nico Siahaan silakan Pak.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN):

Baik, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Sekaligus dua-duanya ya Pak Nico, Spanyol dan Serbia.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN):

Baik Ketua.

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang terhormat Bapak Menteri dan para tamu yang sudah hadir.

**Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Rancangan Undang-Undang
Tentang**

**Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama dibidang
Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the
Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative
Activities in the Field of Defence*) dan**

**Rancangan Undang-Undang
Tentang**

**Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Serbia tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan (*Memorandum of
Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government
of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*).**

Dibacakan oleh : Junico BP. Siahaan
Nomor Anggota : A-151

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swasti astu,

Namo budaya.

Merdeka!!!

Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili Pemerintah, Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan Rapat Kerja yang berbahagia ini.

Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang di berikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk menyampaikan pandangan umum tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan yang akan dibahas antara DPR RI dengan Pemerintah.

Pimpinan Sidang yang terhormat.

Masalah pertahanan merupakan persoalan yang sangat kompleks, ketidak mampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan alutsista menyebabkan suatu negara tidak dapat mempertahankan kedaulatannya. Dalam menangani masalah pertahanan suatu negara tidak mungkin melepaskan diri dari negara lain, walaupun system pertahanan suatu negara sudah sangat maju, namun masih tetap di butuhkan adanya suatu kerja sama dengan negara lain.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memang tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan negara lain dalam upaya mewujudkan kepentingan nasional, hubungan atau keterkaitan dengan negara lain dapat dilakukan dengan berbagai bentuk diantaranya adalah melalui perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Dalam kerangka inilah maka Pemerintah telah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang seperti yang disebut di atas untuk dibahas oleh DPR RI dan pada gilirannya dapat disahkan menjadi Undang-Undang yang akan mengikat secara hukum atau *legaly binding*.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol dalam bidang pertahanan telah di mulai sejak tahun 1976. Pada tahun 1980 telah dilakukan kerja sama pada bidang industry strategis seperti pesawat terbang, yaitu memproduksi pesawat angkut CN235.

Sebagai tindak lanjut dari hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol dengan menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta.

Sedangkan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia masih terbatas di bidang logistic dalam bentuk pembelian amunisi dan senjata yang merupakan alat utama system senjata secara rutin yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Untuk meningkatkan hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah

Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta.

Peningkatan kerja sama ini didasarkan pada pertimbangan teknologi dan mutu hasil industry hasil pertahanan Republik Serbia yang sesuai dengan *standart North Atlantic Treaty Organization* atau NATO. Keunggulan mutu hasil Republik Serbia diperkuat dengan bukti pembelian komponen tertentu dari beberapa produsen amunisi negara lain, seperti Belgia, Spanyol dan Malaysia yang membeli komponen tertentu dari industry pertahanan Republik Serbia. Keunggulan senjata dan amunisi Republik Serbia dapat dimanfaatkan sebagai alternative peninjauan kerja sama industry pertahanan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI siap untuk membahas dan mendalami RUU ini bersama dengan Fraksi-Fraksi lain demikian juga dengan Pemerintah. Sebab kami menganggap bahwa pengesahan terhadap nota kesepahaman ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka!!!

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Nico Siahaan.
Kalau mau diserahkan silakan.
Dari Fraksi PDI Perjuangan Bapak Nico Siahaan.
Selanjutnya kita lanjutkan Fraksi Partai Golkar.
Silakan Bapak Bambang.

F-PG (BAMBANG ATMANTO WIYOGO, S.E.):

Terima kasih.

**Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Rancangan Undang-Undang
Tentang**

**Pengesahaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama dibidang
Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the
Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative
Activities in the Field of Defence*) dan**

**Rancangan Undang-Undang
Tentang**

**Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Serbia tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan (*Memorandum of
Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government
of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*).**

Dibacakan oleh : Bambang Wiyogo, S.E.
Nomor Anggota : A-250
Dapil : DKI Jakarta I

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Rapat Kerja Komisi I DPR RI,
Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,**

**Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,
Serta salam hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama perkenanlah kami mengajak Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya untuk kita semua, sehingga kita hari ini masih dapat berkumpul bersama di tempat untuk mengikuti Rapat Kerja Agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati.

Aspek pertahanan merupakan satu factor yang sangat penting yang hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara. Mempertahankan diri terhadap ancaman, baik ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Fraksi Partai Golkar DPR RI sependapat dengan kerja sama pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan dan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan sangatlah penting dan diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan antar kedua negara.

Atas dasar itulah maka Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan persetujuan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta. Dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2011. Mutlak diperlukan dan segera diratifikasi untuk lebih meningkatkan efektifitas kerja sama antara kedua negara dalam melakukan kerja samanya.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan kerangka berpikir itulah maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan untuk dapat dibahas pada tingkat yang lebih lanjut.

Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, petunjuk serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam rangka menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 4 Desember 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Golkar
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ketua

Sekretaris

Melchias Markus Mekeng

Dr. Adies Kadir, S.H.,

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Bambang.
Kalau mau diserahkan silakan.
Terima kasih dari Fraksi Partai Golkar.
Kita lanjutkan dari Fraksi Partai Gerindra.
Silakan Bapak Martin Hutabarat.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saudara Pimpinan, Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Fraksi Partai Gerindra juga memahami betapa pentingnya Undang-Undang ini kita saahkan dalam rangka membangun, menjaga dan meningkatkan kerja sama kita di bidang pertahanan dengan negara Spanyol dan Serbia. Apalagi kedua negara ini adalah negara yang sudah sejak lama memiliki hubungan baik, memiliki kerja sama yang luas dengan Indonesia. Serbia adalah penerus dari negara Yugoslavia, Yugoslavia karena perang saudara tidak bisa menjaga persatuannya pecah menjadi 6 atau 7 negara. Dan Serbia adalah penerusnya Yugoslavia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Indonesia sejak dulu.

Begitu juga Spanyol, Spanyol juga seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri telah mengadakan kerja sama di bidang industri strategis pembuatan pesawat terbang, memproduksi pesawat angkut CN235 sejak tahun 1980. Tetapi 32 tahun kemudian, tahun 2012 kita membeli pesawat Spanyol buatan Spanyol yang sama dengan CN tersebut. Padahal pada tahun 1980 sudah kerja sama militer, sudah kerja sama membuat pesawat terbang. 32 tahun kemudian kok kita impor lagi pesawat terbang dari negara Spanyol.

Memang ini menjadi satu teka-teki dari dulu seolah-olah pesawat yang kita buat itu kita aku, kita buat padahal sebenarnya enginenya semuanya dari Spanyol. Jadi kalau di negara-negara lain menganggap buatan Indonesia pesawat terbang tetapi itu tidak ada negara lain yang membeli karena dianggap itu sebenarnya kita mengaku-ngaku saja. Spanyol yang berada di belakang pembuatan pesawat terbang tersebut, tapi itu soal lain saya pikir. Hanya memang pada saat kita melakukan hubungan kerja sama pada pertahanan yang kita bicarakan seperti sekarang harusnya kerja sama itu adalah dalam rangka meningkatkan juga kemampuan pertahanan kita dalam rangka membuat agar kerja sama itu juga berguna bagi kepentingan pertahanan kita.

Pada dasarnya kami setuju Pak Menteri, bahwa kerja sama dengan Spanyol dan kerja sama dengan Serbia ini perlu di lakukan. Hanya soal masalah judulnya apakah memang ada perbedaan atau hanya kata-katanya saja. Di sana disebut kalau kerja sama dengan Spanyol itu adalah tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Tapi kalau tentang Serbia adalah kerja sama di bidang pertahanan, apakah memang namanya saja yang berbeda penamaan judulnya atau memang ada sesuatu yang secara strategis berbeda yang di maksud dengan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Spanyol dan antara Indonesia dengan Pemerintah Serbia.

Kami melihat bahwa kerja sama ini penting dan kami mendukung agar kita meningkatkan pembicaraan ini kepada tingkat II agar dapat menyetujui ini di undangkan nantinya sebagai

bagian daripada tanggungjawab kita membangun kerja sama pertahanan dengan Spanyol dan Serbia.

Demikian Bapak Ketua dan saudara Menteri.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Fraksi Partai Gerindra.
Belum di serahkan? Oke, nanti.
Kita lanjutkan Fraksi Partai Demokrat.
Pak Hari Kartana, silakan Pak.

F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.):

**Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan**

Juru bicara : Ir. Hari Kartana
No. Anggota : A-418

**Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Hadirin yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas segala karunia dan cinta kasih-Nya kita dapat melaksanakan tugas konstitusional sebagai Anggota DPR RI dalam Rapat Komisi I DPR RI guna memberikan pandangan umum terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan di bidang Kerja Sama Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja sama di bidang Pertahanan.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang di wujudkan dalam perjanjian internasional. Pelaksanaan perjanjian internasional di dasarkan atas pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara, kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri, dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian Indonesia harus berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

Terkait dengan memorandum kesepahaman peningkatan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Republik Serbia kami dari Fraksi Partai Demokrat memiliki pandangan sebagai berikut:

Pertama, secara umum kerja sama di bidang pertahanan ini merupakan bagian dari pengamalan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kedua, kerja sama ini akan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan hubungan bilateral yang sudah terbina sejak lama khususnya di bidang pertahanan.

Ketiga, ratifikasi persetujuan memorandum kesepahaman peningkatan kerja sama di bidang pertahanan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Republik Serbia akan memberikan bobot legal politik dan diplomasi yang lebih baik dalam hubungan Indonesia dengan ketiga negara dimaksud.

Namun demikian saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta hadirin yang terhormat.

Kerja sama di bidang pertahanan ini mengharuskan adanya persyaratan pertama adalah adanya aturan transparansi atau komunikasi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Kedua, adanya pengaturan yang ketat di mana masing-masing pihak tidak melakukan tindakan provokatif yang mengundang tindakan reaktif militer. Ketiga, adanya deklarasi Bersama yaitu kerangka upaya efektif untuk mencegah konflik atas dasar prinsip Bersama yang diakui dan dipatuhi Bersama melalui kesepakatan untuk tidak menggunakan kekuatan militer sebagai alternative utama ketika terjadi perselisihan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta hadirin yang terhormat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat memandang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan perlu didukung dan dibahas dengan seksama.

Demikian pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 4 Desember 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ketua

Sekretaris

Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.
M.H.

A-434

Didik Mukrianto, S.H.,

A-437

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Hari Kartana.
Kalau mau di serahkan silakan Pak.

Anggota Komisi I DPR RI dan para Menteri yang kami hormati.

Untuk Fraksi PAN hari ini tidak bisa mengirim perwakilan, karena tugas luar. Tapi sudah menyerahkan berkas naskah tertulis sudah ada di kita. Kesimpulannya kami bacakan.

Pemandangan Umum Fraksi Partai PAN terkait dengan:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Fraksi PAN menyatakan menyetujui untuk pengesahan kedua nota kesepahaman tersebut untuk dibahas Komisi I DPR RI Bersama-sama dengan Pemerintah pada hari ini.

Naskahnya sudah ada nanti akan kami serahkan selesai acara. Kita lanjutkan saja setelah PAN, Fraksi PKB.

Silakan Bapak Arvin Hakim Thoha.

F-PKB (ARVIN HAKIM THOHA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan**

Disampaikan oleh juru bicara : Arvin Hakim Thoha
No. Anggota : A-53

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI,
Yang terhormat saudara Anggota Komisi I DPR RI,**

**Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat saudari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Dan hadirin yang berbahagia.**

Saya singkat saja, setelah melalui pembicaraan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, baik dengan pihak Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, serta setelah mendapat masukan dari para pakar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, maka dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan untuk dibahas dan di tetapkan menjadi Undang-Undang.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU ini. Atas perhatian saudara, para Anggota, para Menteri dan seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih.

*Wallahu Muafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wararakatuh.*

Jakarta, 4 Desember 2018

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI

H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Silakan kalau mau diserahkan Bapak Arvin.
Terima kasih Bapak Arvin Hakim Thoha dari Fraksi PKB.
Kita selanjutnya PKS tapi masih dalam perjalanan.
Kita lanjutkan ke Fraksi PPP, Ibu Lena Maryana.
Silakan.

F-PPP (Dra. Hj. LENA MARYANA):

Terima kasih Pimpinan.

**Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the
Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the
Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia**

dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*).

Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Selasa 4 Desember 2018 oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Dra. Hj. Lena Maryana, Anggota DPR RI Nomor A-513, Dapil DKI II.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang mulia Pimpinan Sidang,
Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Para Anggota Komisi I DPR RI yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada pagi hari ini kita bisa membahas kedua Rancangan Undang-Undang yang kami sebutkan di atas. Solawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Aamin.

Selanjutnya dalam pemandangan umum ini kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI melihat adanya *urgency* peningkatan kerja sama bilateral dengan berbagai negara termasuk dalam lingkup pertahanan. *Urgency* tersebut muncul karena peningkatan bilateralism negara-negara besar seperti keputusan sepihak Amerika Serikat dalam masalah Palestina dan penarikan negara besar tersebut dari berbagai perjanjian internasional, seperti perubahan iklim.

Dinamika China di Laut China Selatan atau Rusia di Eropa Timur juga penting dilihat sebagai penguatan Unilateralisme tersebut. Selain itu, meski Amerika Serikat dan China baru saja membuat semacam gencatan senjata dalam perang dagang disela-sela konferensi tingkat tinggi G20 di Argentina beberapa hari lalu. Namun, tantangan geo ekonomi masih belum dapat dipastikan mereda. Proteksionalisme dan dinamika aliran dana berbalik ke Amerika Serikat dan Eropa masih menjadi resiko signifikan. Berbagai tantangan eksternal tersebut akan lebih mudah diantisipasi oleh Indonesia jika mempunyai kerja sama bilateral yang lebih erat dengan lebih banyak negara di berbagai kawasan termasuk Spanyol di kawasan Eropa.

Kerja sama bilateral tersebut dapat terwujud salah satunya dengan pembuatan dan ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan. Perjanjian kerja sama pertahanan ini akan melengkapi instrument kerja sama bilateral lainnya seperti peningkatan kunjungan kepala negara, Pemerintah, dan pejabat tinggi penandatanganan *momerandum of understanding* dan perjanjian investasi dan sebagainya.

Hadirin yang berbahagia.

Indonesia dan Spanyol adalah dua negara yang tergolong *middle power* atau kekuatan menengah, terlebih Spanyol juga memiliki industri pertahanan yang mumpuni, baik untuk alat utama sistem senjata alutsista, matra darat, laut dan udara. Bahkan Indonesia pernah dan masih mengadakan kerja sama strategis dengan perusahaan Spanyol bernama Casa yang Bersama PT. Dirgantara Indonesia yang dulunya disebut Industry Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian melahirkan pesawat transportasi CN 235, CN 295 dan sebagai varian lainnya.

Produk kerja sama antar industri pertahanan kedua negara tersebut masih dipakai hingga saat ini dan bahkan dipesan oleh institusi keamanan Indonesia. Melalui perjanjian kerja sama pertahanan ini Indonesia akan berpeluang memperluas promosi ekspor dan berbagai bentuk kerja sama industri pertahanan termasuk seperti disebut dalam pasal kerja sama angka 5 untuk penelitian dan pengembangan Bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik dan sebagainya.

Bapak Menteri dan hadirin yang kami muliakan.

Hal serupa juga dilihat oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam perjanjian kerja sama pertahanan dengan Republik Serbia meski berskala lebih kecil daripada negara-negara kunci di Eropa, Serbia cukup maju di dalam industri pertahanan. Berbagai bentuk kerja sama seperti di sebut dalam Pasal 6, antara lain program pelatihan dan Pendidikan, pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama, industri pertahanan dan lain-lain. Dapat dioptimalisasi dengan adanya perjanjian kerja sama pertahanan ini.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, juga berharap perjanjian kerja sama pertahanan ini juga dapat meningkatkan diplomasi Indonesia ke Eropa khususnya kawasan Balkan. Hal ini dikarenakan pada dua decade sebelumnya di kawasan tersebut terjadi perang etnis dan genosida yang sebagian besar kasusnya telah di sidangkan.

Sebagai negara muslim, Indonesia tentu berharap perjanjian kerja sama pertahanan ini justru memperkuat posisi diplomasi Indonesia untuk ikut mencegah hal serupa terjadi kembali. Terlebih mulai 1 Januari 2019, Indonesia akan bertugas sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga berbagai masalah keamanan regional perlu dibantu untuk di selesaikan termasuk di kawasan Balkan tempat terdiamnya saudara kita dari Bosnia, Kosovo dan Albania. Sebagaimana juga saudara-saudara kita dari Serbia, Montenegro, Kroasia, dan Slovenia.

Akhirnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyatakan bersedia untuk membahas kedua RUU ini Bersama Pemerintah. Dan dengan demikian, kami tutup pemandangan umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya.

*Billahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Silakan Ibu Lena kalau mau diserahkan.
Terima kasih Fraksi PPP, Ibu Hj. Lena Maryana.
Kita lanjut saja Fraksi Partai Nasdem.
Silakan Bapak Irjen Pol. Purn. Jacki Uly.

F-NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

**Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the
Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the
Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum
of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*)**

disampaikan oleh : Jacli Uly
Nomor Anggota : A-28

Dapil : NTT II.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om swasti astu,
Salam restorasi.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat saudari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kecerdasan akal, kejernihan kalbu dan kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja ini dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Seperti yang kita ketahui sejumlah Undang-Undang telah mengatur perjanjian kerja sama antara Republik Indonesia dengan pihak lain yang cukup rinci. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 11 Ayat (2) menyebutkan bahwa perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang itu harus dengan persetujuan DPR RI.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri di sebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) bahwa dalam penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia. Namun, perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan DPR RI. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang telah diatur bahwa perjanjian internasional disahkan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan antara lain, masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara.

Sesuai dengan aturan yang berlaku setelah ditandatanganinya kedua perjanjian dengan negara sahabat, maka kedua nota kesepahaman kesepahaman tersebut wajib kita bahas Bersama untuk dipelajari apakah akan diratifikasi atau tidak.

Saya langsung saja loncat pada pendapat dari Fraksi Partai Nasdem.

Hadirin yang kami hormati.

Dilihat dari hal-hal di atas kedua negara sangat layak menjadi mitra negara kita. Dalam saling mengembangkan potensi pertahanan, baik di sisi industry pertahanan bahkan dalam postur pertahanan itu sendiri. Untuk itu, Fraksi Partai Nasdem DPR RI setuju untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*memorandum of understanding between the ministry of defend of the Republic of Indonesia and the ministry of defend of the kingdom of Spain on coorporative activities in the field of defend*) dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*).

Fraksi Partai Nasdem DPR RI menggarisbawahi bahwa pembicaraan mengenai ratifikasi terus berjalan di atas bingkai azas kedaulatan, kesetaraan, timbal balik, saling menghormati,

etikad baik, konsensualisme, kepastian hukum dan saling manfaat sehingga ratifikasi ini betul-betul berkontribusi positif kepada Indonesia.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om santi santi om,

Salam restorasi.

Jakarta, 4 Desember 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Sekretaris

H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.

A-29

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Jacli Uly.

Kalau mau di serahkan silakan.

Kita lanjutkan acara pemandangan umum ini sekarang kami persilakan Fraksi PKS.

Silakan Bapak Dr. Sukamta.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan**

Disampaikan oleh : Dr. Sukamta

No. Anggota : A-113

Dapil : Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Para hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang kami hormati.**

Saya ingin membacakan pandangan umum Fraksi PKS, secara ringkas. Fraksi PKS memandang bahwa setiap kerja sama pertahanan merupakan isu strategis yang harus dibahas secara seksama dan serius oleh DPR RI yang memang berfungsi mewakili kepentingan rakyat. Pandangan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 10 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan harus dilakukan dengan Undang-Undang yang perlu melibatkan DPR RI.

Kerja sama pertahanan perlu dibahas dengan baik untuk menguji agar kerja sama tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat kedua negara. Fraksi PKS memandang kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Serbia ini harus benar-benar bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat kedua negara. Bukan justru digunakan untuk melanggar hak-hak dasar yang dimiliki masyarakat tersebut.

Pimpinan, Anggota, para Menteri dan seluruh jajaran yang hadir.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan di atas, kami Fraksi PKS menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Untuk dibawa ke pembicaraan ke pembicaraan Tingkat I dan dibahas Bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban. Bukan hanya bagi seluruh warga negara Indonesia tapi juga bagi seluruh warga dunia. Dan semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.

Jakarta, 4 Desember 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

Dr. Sukamta

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Dr. Sukamta.
Silakan kalau mau di serahkan.
Terakhir Fraksi Hanura.

Silakan Bapak Timbul P. Manurung.

F-HANURA (Drs. TIMBUL P. MANURUNG):

Terima kasih Pimpinan Rapat.

**Yang kami hormati Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI,
Yang kami hormati saudari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang kami hormati saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang kami hormati saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Para hadirin sekalian yang saya hormati pula.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.*

**Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura
Tentang
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.**

Juru bicara : Drs. Timbul P. Manurung
Dapil : Jawa Barat I
No. Anggota : A-550

Fraksi Partai Hanura dalam kesempatan ini menyatakan menyetujui pengesahan kedua nota kesepahaman tersebut untuk dibahas oleh Komisi I DPR RI Bersama-sama dengan Pemerintah pada hari ini. Naskah tertulis dari pandangan umum Fraksi Partai Hanura akan menyusul.

Demikian yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 4 Desember 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Hanura
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

H. Inas Nasrullah Zubir BE., S.E.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Timbul P. Manurung.

Dengan demikian Bapak Menteri dan teman-teman seluruh Fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya bahwa kita lihat seluruh Fraksi menyetujui Pak, untuk hal ini kita bicarakan dengan Pemerintah hari ini.

Namun demikian, kita juga ingin mendengar jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tadi.

Silakan Bapak Menteri.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.

Pada prinsipnya kami senang dan mudah-mudahan ini bisa dibawa ke Tingkat II.
Demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan.

Selanjutnya kita akan langsung untuk membahas materi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari kedua RUU yang kita bicarakan ini. Kita mulai dengan DIM RUU dan di lanjutkan dengan penjelasannya tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kita lihat DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*)

DIM Nomor 1

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*)
Saya rasa ini judul tidak ada masalah.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia.
Ini seperti kebiasaan kita lihat tidak ada masalah.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3.

Menimbang:

- a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4.

- b. Bahwa untuk meningkatkan kerjasama dibidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta di

Indonesia telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*).

Tidak ada masalah?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5.

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*).

DIM Nomor 6 tidak ada masalah.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7.

Mengingat:

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 185, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4012)

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 9.

Dengan persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 10.

Menetapkan Undang-Undang tentang Pengesahan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*).

DIM Nomor 10 tidak ada masalah.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 11.
Pasal 1.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 12.

(1) Mengesahkan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta-Indonesia.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 13.

(2) Salinan naskah asli nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 14.
Pasal 2.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16.

Disahkan di Jakarta pada tanggal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 17.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yassona Laoly.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kita lanjut kepada Rancangan Penjelasan atas Rancangan yang sudah kita bacakan tadi.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengesahaan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*)

DIM Nomor 1.
Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Pengesahaan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*)

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2.
Umum.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3.
Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4.
Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerjasama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5.
Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta-Indonesia dan selanjutnya perlu di sahkan dengan Undang-Undang.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6.

Materi muatan dalam nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7.

1. Bidang dan lingkup kerjasama, meliputi:

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8.

a. Pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat Kementerian termasuk Angkatan Bersenjata.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 9.

b. Pertukaran informasi atau praktek-praktek terbaik dalam bidang-bidang seperti kebijakan pertahanan, Pendidikan dan pelatihan, bantuan media, peraturan perundang-undangan, jasa militer dan bidang lain yang disepakati bersama.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 10.

c. Pembinaan hubungan yang lebih erat antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata kedua negara dan pengembangan kerja sama dalam bidang:

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 11.

1) Operasi pemeliharaan perdamaian.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 12.

2) Bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 13.

3) Operasi pencarian dan penyelamatan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 14.
4) Manajemen krisis.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15.
5) Komando, kendali, komunikasi dan sistem informasi.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16.
6) Pendidikan dan pelatihan dan latihan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 17.
7) Kegiatan lainnya yang disepakati Bersama.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18.
d. Dukungan peran serta personil Angkatan Bersenjata masing-masing dalam berbagai kegiatan yang tepat.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 19.
e. Peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 20.
f. Pengembangan kerja sama di bidang industry pertahanan meliputi alih teknologi, penelitian Bersama, produksi Bersama dan pemasaran Bersama.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 21.
2. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 22.
3. Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan nota kesepahaman di sesuaikan dengan ketersediaan dana dan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing pihak.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 23.
4. Penyelesaian masalah yang timbul dari penafsiran nota kesepahaman di lakukan secara damai melalui perundingan antara para pihak dan apabila masalah tidak dapat terselesaikan akan di selesaikan melalui saluran diplomatik.

DIM Nomor 24.
II. Pasal demi Pasal.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 25.
Pasal 1.
Cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 26.
Pasal 2.
Cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 27.
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

Ini RUU tentang kerja sama dengan Spanyol.
Yang kedua kerja sama dengan Serbia.

DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengesahaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*). Kita mulai dari DIM Nomor 1.

DIM Nomor 1.
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pengesahaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia,

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3.
Menimbang:

- a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4.

- b. Bahwa untuk meningkatkan kerjasama dibidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta-Indonesia telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5.

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang.

DIM Nomor 6.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7.

Mengingat:

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disepakati?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 185, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4012)

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 9.

Dengan persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan:

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 10.

- e. Menetapkan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 11.
Pasal 1.
Bisa disepakati?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 12.

(1) Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta-Indonesia.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 13.

(2) Salinan naskah asli Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Serbia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 14.
Pasal 2.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16.

Disahkan di Jakarta pada tanggal Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 17.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Laoly.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

(RAPAT: SETUJU)

Demikian rancangan Bapak-bapak sekalian dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI dan pihak Pemerintah. Selanjutnya kita lanjut membahas rancangan penjelasan pengesahan dari DIM tentang kerja sama dengan Serbia.

Kita lanjut rancangan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*).

DIM Nomor 1.

Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*memorandum of understanding between the government of the Republic of Indonesia and the government of Republic of Serbia on corporation in the field of defend*).

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2.
Umum.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3.

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerjasama dibidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5.

Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 September 2011 di Jakarta-Indonesia yang selanjutnya disebut dengan nota kesepahaman perlu disahkan dengan Undang-Undang.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6.

Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang kerja sama di bidang pertahanan, antara lain:

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7.

1. Area kerja sama, meliputi:

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8.

- a. Kebijakan pertahanan dan strategis.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 9.

- b. Dukungan logistic dan kerja sama industry pertahanan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 10.

- c. Pendidikan dan pelatihan dan selanjutnya.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 11.

- d. Kerja sama lain atas dasar kepentingan Bersama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 12.

2. Bentuk kerja sama, meliputi:

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 13.

- a. Kunjungan pejabat.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 14.

- b. Dialog pertahanan dan strategis.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15.

- c. Pertukaran inteligen.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16.

- d. Pertukaran pengalaman dan konsultasi.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 17.

- e. Program pelatihan dan Pendidikan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18.

- f. Partisipasi dalam konferensi, symposium dan seminar.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 19.

- g. Pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan-bantuan teknis kerja sama industry pertahanan, dan

DIM Nomor 20.

- h. Bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepekat oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 21.

3. Pembentukan komite bersama guna mengkoordinasikan, memonitor, mengatur, dan mengimplementasikan nota kesepahaman.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 22.

4. Pertukaran informasi yang bersifat tidak rahasia, sedangkan informasi yang bersifat rahasia akan diatur dalam pengaturan terpisah.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 23.

5. Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pertemuan dan penyambutan komite Bersama dan biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman dibuat dengan pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua pihak.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 24.

6. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual yang dapat diatur dalam perjanjian terpisah.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 25.

7. Para pihak berkewajiban mematuhi hukum, peraturan dan prosedur negara masing-masing serta dapat memberikan perawatan darurat medis dan gigi dalam pelaksanaan nota kesepahaman.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 26.

8. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam komite Bersama. Apabila perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan jika perlu penyelesaiannya dilakukan melalui saluran resmi.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 27.
II. Pasal demi Pasal.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 28.
Pasal 1 cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 29.
Pasal 2 cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 30.
Tambahkan lembaran negara Republik Indonesia Nomor

(RAPAT: SETUJU)

Demikian RUU tentang penjelasannya DIM, keduanya sudah kita sampaikan. Dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan materi DIM tadi sudah kita sampaikan. Kita minta sekarang pendapat dari para Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI apakah dapat disetujui. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi kedua untuk pandangan Fraksi Mini yang terakhir.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita selesai membahas DIM RUU dan penjelasannya antara Kementerian Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Spanyol dan juga dengan Kementerian Pertahanan Pemerintah Republik Serbia kerja sama di bidang pertahanan.

Untuk ini, kita akan lanjut saja yang nanti mau sholat dan lain-lain silakan diatur. Kita akan langsung masuk ke pendapat akhir dari Fraksi-fraksi, biar kita cepat selesai.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kita mohon perwakilan Fraksi-Fraksi menyiapkan diri untuk pendapat akhir Fraksi-Fraksi tetap kita mulai dari PDI Perjuangan.

Silakan Bapak Nico.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN):

Terima kasih Ketua.

Sekali lagi kita sudah sama-sama membahas DIM dan izinkan kami untuk menyampaikan

**Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang**

**Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan
(*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of
Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities
in the Field of Defence*) dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
(*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*)**

Dibacakan oleh : Junico BP Siahaan.
No Anggota : A-151
Dapil : Kota Bandung, Kota Cimahi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
On swasti astu,
Namo budaya,
Merdeka.

Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah, Pimpinan Sidang dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Setelah menjalani serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai kalangan dan Rapat Dengar Pendapat serta Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*). Maka tibalah saatnya kami memberikan pendapat akhir sebagai wadah bagi Fraksi-fraksi untuk menyatakan sikap.

Sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan tentang pandangan umum. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan bahwa kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol maupun antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia adalah merupakan sebuah kebutuhan.

Nota kesepahaman tersebut menjadi tonggak sejarah penting bagi hubungan Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol maupun hubungan Republik Indonesia dan Republik Serbia khususnya di bidang pertahanan. Masing-masing negara sepakat untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama teknis yang telah terjalin.

Berdasarkan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, prinsip-prinsip kesetaraan tidak mencampuri urusan dalam negeri dan saling menguntungkan.

Sebelum ditandatanganinya nota kesepahaman di bidang pertahanan hubungan kerja sama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol sudah dimulai sejak lama. Kedua negara dapat dikatakan memiliki persamaan pendekatan dalam hubungan internasional khususnya berkaitan dengan tujuan mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional, dialog lintas agama, penanggulangan terorisme dan saling dukung

dalam forum internasional. Hal ini tercermin dengan adanya kerja sama dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah naungan PBB di beberapa wilayah konflik.

Setelah ditandatanganinya nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang kegiatan kerja sama dibidang pertahanan belum terdapat implementasi kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara selain melanjutkan perjanjian yang sudah ada.

Untuk itu, diharapkan dengan dilakukan pengesahan nota kesepahaman di bidang pertahanan antara kedua negara terbuka kesempatan bagi Indonesia dalam proses alih teknologi untuk pengembangan industry pertahanan, mengintensifkan kerja sama pertahanan serta meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi kerja sama pertahanan diantara kedua negara.

Sementara dengan adanya nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia, maka ruang lingkup kerja sama menjadi lebih luas, yakni meliputi kebijakan pertahanan dan strategis dukungan logistic dan kerja sama industry pertahanan, Pendidikan dan pelatihan dan kerja sama lain atas dasar kepentingan Bersama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkepentingan.

Kerja sama juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti kunjungan pejabat, dialog pertahanan dan strategis, pertukaran intelijen, pertukaran pengalaman dan konsultasi, program pelatihan dan Pendidikan partisipasi dalam konferensi, symposium, dan seminar. Pengadaan alat-alat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industry pertahanan dan bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh para pihak atau otoritas yang berkompeten.

Nota kesepahaman ini juga akan memberikan dampak positif bagi pertahanan Indonesia karena hanya melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan resiko terhadap keamanan negara masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa nota kesepahaman tersebut perlu disahkan dalam bentuk Undang-Undang, sehingga dapat diterapkan. Namun, kami juga mencatat beberapa masalah penting untuk mendapat perhatian kita Bersama, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini nantinya Pemerintah Indonesia akan berpegang teguh pada prinsip bahwa nota kesepahaman harus berdasarkan pada persamaan keuntungan Bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan negara.
2. Semua informasi yang bersifat rahasia di bidang pertahanan agar mendapat perlindungan secara ketat oleh masing-masing negara.
3. Hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman ini agar mendapat perlindungan yang maksimal, kewajiban untuk saling memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat diatur dalam perjanjian terpisah.
4. Nota kesepahaman ini hendaknya bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif.
5. Komite Bersama perlu segera dibentuk sehingga dapat melaksanakan tugas untuk mengkoordinasikan, memonitor, mengatur dan mengimplementasikan nota kesepahaman.
6. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam komite Bersama, apabila perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan, jika perlu penyelesaiannya dilakukan melalui saluran resmi.

Demikian beberapa catatan yang perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini. Dan pada kesempatan ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence*)

disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna Dewan untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MERDEKA!!!

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Nico.
Silakan kalau mau diserahkan.
Terima kasih dari Fraksi PDI Perjuangan.
Kita lanjutkan pendapat akhir dari Fraksi Partai Golkar.
Silakan Bapak Bambang.

F-PG (BAMBANG ATMANTO WIYOGO, S.E.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Terhadap

Rancangan Undang-Undang

Tentang

**Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang**

Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan

Rancangan Undang-Undang

Tentang

**Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan**

Dibacakan oleh : Bambang Wiyogo

No. Anggota : A-250

Dapil : DKI Jakarta I

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

On swasti astu,

Namo budaya.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Kerja Komisi I DPR RI,

Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajarannya,

Yang terhormat Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya,

Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya,

Para Anggota Komisi I DPR RI, serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Kami langsung bacakan saja, Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, memang mutlak diperlukan mengingat Indonesia negara kepulauan yang berciri nusantara juga mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dalam rangka pengamanan wilayah kedaulatan, baik di darat, laut dan udara.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati.

Akhirnya berdasarkan pandangan dan beberapa point utama yang telah kami kemukakan, maka dengan ini Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim*, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, petunjuk serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.*

Jakarta, 4 Desember 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Melchias Marcus Mekeng

Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Bambang Wiyogo.
Silakan kalau mau diserahkan.
Terima kasih Fraksi Partai Golkar.
Kita lanjutkan Fraksi Partai Gerindra.
Silakan.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.
Setelah mendengar apa yang disampaikan Pimpinan tentang DIM itu kami dari Fraksi Partai Gerindra akan menyampaikan pandangan mini Fraksi Partai Gerindra.

**Pendapat Mini Fraksi Partai Gerindra
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan
(*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of
Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities
in the Field of Defence*) dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia**

**dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
(Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence)**

Setelah mendengarkan kami menyetujui kedua Rancangan Undang-Undang ini ditindaklanjuti ke tahap berikutnya di Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Fraksi Partai Gerindra.
Kita lanjutkan Fraksi Partai Demokrat Bapak Hari Kartana silakan.

F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.):

**Pendapat Mini Akhir Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan**

Juru bicara : Ir. Hari Kartana
No. Anggota : A-418

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Hadirin yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Dalam kaitannya dengan Rancangan Undang-Undang ini, Fraksi Partai Demokrat memiliki pandangan sebagai berikut.

Pertama, secara keseluruhan bidang pertahanan dengan Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Serbia selain semakin mempererat hubungan bilateral yang sudah terjalin baik juga membuka beberapa ruang baru dalam bidang pertahanan seperti dialog keamanan global, kemajuan industry pertahanan, alutsista, Pendidikan dan pelatihan serta lain-lain.

Terkait dengan hal ini tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana kesiapan institusional kita, kesiapan legal operasional, rencana jangka menengah dan panjang, koordinasi beberapa kementerian/lembaga negara terkait, dukungan BUMN dan juga lain-lain, hal-hal tersebut harus segera disiapkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan bukan semata naskah

formal belaka akan tetapi memang secara substansi dapat meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia.

Kedua, kerja sama pertahanan dengan Spanyol dapat menambah bobot kerja sama bilateral yang telah terbangun selama ini baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kerja sama pertahanan Indonesia-Spanyol telah dibangun sejak tahun 1970-an yang diawali dengan pembelian Airbus dan Casa. Adanya Rancangan Undang-Undang ini menjadikan kerja sama ini lebih bermakna strategis.

Ketiga, walaupun Serbia bukan termasuk Anggota NATO namun secara geografis politik memiliki posisi penting. Interaksinya yang lebih dekat dengan Rusia membuat Indonesia dapat menjalankan politik luar negeri yang tetap netral, tidak berat ke arah Amerika atau barat, sehingga pembangunan kerja sama di bidang pertahanan dengan Serbia dapat menegaskan doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang terhormat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional harus dilakukan dengan bentuk Undang-Undang apabila berkenaan dengan, yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Maka pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Fraksi Partai Demokrat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.

Namun demikian, ada hal yang harus ditekankan dan diperhatikan kerangka dasar dari kerja sama ini harus mengembangkan kemitraan strategis, saling menghormati dan sejajar serta tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing negara. harus diingat bahwa Spanyol adalah negara Anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sedangkan salah satu kerja sama yang dibangun dalam bidang pertahanan dengan kedua negara tersebut adalah pertukaran informasi rahasia. Sebagai Anggota NATO, Spanyol memiliki aturan khusus yang membuat mereka harus saling terbuka terkait informasi dengan sesama Anggota NATO lainnya. Kondisi ini yang harus diperhatikan, diwaspadai dan dilakukan tindakan pencegahan oleh Kementerian Pertahanan. Indonesia harus meminta jaminan agar Spanyol tidak menyebarkan informasi pertahanan Indonesia ke negara lain termasuk Anggota NATO.

Demikian pendapat mini akhir Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 4 Desember 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ketua

Sekretaris

**Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.
M.H.**

Didik Mukrianto, S.H.,

A-434

A-437

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Silakan Bapak Hari kalau mau diserahkan.

Terima kasih Fraksi Partai Demokrat Bapak Hari Kartana.

Untuk PAN tetap belum ada perwakilan akan tetapi sudah menitip naskah persetujuan tertulis. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional, pertama Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Fraksi PAN menyetujui pengesahan kedua nota kesepahaman tersebut untuk selanjutnya dibahas pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

Kita lanjutkan kepada Fraksi PKB.

Silakan Bapak Arvin Hakim Thoha.

F-PKB (ARVIN HAKIM THOHA):

**Pendapat Mini Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan**

disampaikan oleh juru bicara : Arvin Hakim Thoha

No. Anggota : A-53

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI,

Yang terhormat saudara Anggota Komisi I DPR RI,

Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,

Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,

Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,

Dan hadirin yang berbahagia.

Pak Menteri, ini saya singkat saja, setelah melalui pembicaraan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, baik dengan pihak Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta setelah mendapat masukan dari para pakar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum. Maka dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU ini.

Atas perhatiannya saudara Pimpinan, para Anggota, para Menteri dan seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih.

*Wallahu Muafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wararakatuh.*

Jakarta, 4 Desember 2018

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI

H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Arvin Hakim Thoha.
Silakan kalau mau diserahkan.
Terima kasih dari PKB.
Kita lanjut Fraksi PPP, silakan Ibu Hajah.

F-PPP (Dra. Hj. LENA MARYANA):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Setelah membaca kedua isi perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Spanyol dan juga Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah dan kita juga sudah membahasnya barusan ini, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang ini untuk dibawa pada tingkat pembicaraan berikutnya.

Catatan-catatan mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut sudah kami rangkum dalam pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan akan kami serahkan nanti melalui Pimpinan.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Kalau mau diserahkan Ibu.

F-PPP (Dra. Hj. LENA MARYANA):

Nanti saja melalui Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Oke, kita lanjutkan Fraksi Partai Nasdem.
Silakan Bapak Jacki Uly.

F-NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

Terima kasih.

**Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasdem
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang
Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om swasti astu.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat saudari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Kami loncat langsung pada kesimpulan akhir.

Hadirin yang kami hormati.

Meratifikasi dua nota kesepahaman ini harus dilaksanakan dengan kalbu yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan nasional kita. Keduanya akan mengakselerasi upaya membangun dan mengembangkan postur pertahanan negara kita. Untuk itu, setelah membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dengan segala dinamikanya serta mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui untuk disahkan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Fraksi Partai Nasdem DPR RI tidak lupa mengingatkan bahwa ratifikasi diikuti dengan sejumlah peraturan yang memudahkan keberlangsungan dan keberlanjutan kerja sama strategis ini ke wilayah operasional. Diharapkan bahwa kerja sama ini dapat menegaskan kepada dunia tentang partisipasi Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mecurahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Om santi santi om,
Salam restorasi.

Jakarta, 4 Desember 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Sekretaris

H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
A-29

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Bapak Jacli Uly.
Silakan kalau mau diserahkan.
Bapak Jackli Uly terima kasih.
Kita lanjutkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Silakan Bapak Dr. Sukamta.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Terhadap
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang
Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan**

disampaikan oleh : Dr. Sukamta
No. Anggota : A-113
Dapil : Daerah Istimewa Yogyakarta

**Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,
Yang terhormat saudari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Para hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan.**

Upaya menjaga stabilitas keamanan di setiap kawasan di dunia harus menjadi fokus utama bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa stabilitas keamanan kawasan merupakan kunci bagi berkembangnya aspek-aspek lain seperti aspek ekonomi. Tanpa stabilitas keamanan mustahil perekonomian suatu negara dapat meningkat dengan baik.

Oleh karena itu, langkah Pemerintah Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Serbia dalam menjalin kerja sama pertahanan

melalui nota kesepahaman yang masing-masing ditandatangani secara terpisah pada 2014 dan 2011 lalu patut diapresiasi. Kerja sama pertahanan ini harus sama-sama dipahami sebagai wujud dari upaya menciptakan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bukan hanya bagi kedua negara tetapi juga dikawasan Eropa dan Asia.

Fraksi PKS menilai bahwa kerja sama pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Republik Serbia, telah sesuai dengan tujuan menciptakan stabilitas keamanan di masing-masing kawasan. Implementasi dari kerja sama pertahanan ini yang akan terus kawal Bersama agar sesuai dengan tujuan dan harapan semua pihak.

Pimpinan, Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, serta hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS memandang bahwa kerja sama pertahanan ini harus dimanfaatkan secara baik oleh Pemerintah Republik Indonesia setidaknya dalam hal meningkatkan kapasitas kemampuan militer Indonesia. Terutama dalam menjalankan tugasnya menjaga pertahanan wilayah Indonesia. Selain itu, kerja sama ini juga dapat mempererat hubungan Pemerintah RI dengan Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Republik Serbia yang sudah terjalin dengan baik.

Kerja sama pertahanan ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah RI dengan negara-negara sahabat. Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia telah menjalankan kerja sama pertahanan dengan Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman, Thailand dan negara-negara sahabat lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia masih memegang teguh prinsip politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Dimana yang dilakukan adalah menjalin kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain bukan bergabung dalam aliansi militer sekelompok negara.

Menimbang beberapa hal yang kami paparkan diatas, kami Fraksi PKS menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Demikian Pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita di dalam mewujudkan perlindungan keamanan dan ketertiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ketua

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

Sekretaris

Dr. Sukamta

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Silakan Bapak Sukamta kalau mau diserahkan.
Terima kasih Dr. Sukamta dari PKS.
Terakhir kita Fraksi Hanura.
Silakan Bapak Manurung.

F-HANURA (Drs. TIMBUL P. MANURUNG):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI,
Yang kami hormati saudari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang kami hormati saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang kami hormati saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
Para hadirin sekalian yang saya hormati pula.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.*

**Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Hanura
Tentang
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan
Rancangan Undang-Undang
Tentang
Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.**

Juru bicara : Drs. Timbul P. Manurung
Dapil : Jawa Barat I
No. Anggota : A-550

Hadirin yang kami hormati.

Bahwa Fraksi Partai Hanura menyatakan menyetujui pengesahan kedua nota kesepahaman tersebut di atas untuk selanjutnya dibahas pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun naskah tertulis dari pendapat akhir mini Fraksi Partai Hanura akan kami susulkan.

Demikian pendapat kami.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Timbul P. Manurung.

Bapak Menteri Pertahanan mewakili Pemerintah Bersama berwakilkan dari Menkumham dan Menlu. Dengan demikian kita sudah mendengar pendapat akhir seluruh fraksi. Dan kesepuluh fraksi di Komisi I DPR RI dapat menyetujui kedua RUU tersebut untuk selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian demikian seluruh Fraksi setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian kita juga meminta kepada wakil Pemerintah untuk menanggapi pendapat akhir dari Pemerintah seperti apa.
Silakan Bapak Menteri.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Pimpinan dan semua Anggota Komisi I DPR RI.

Kami mengucapkan terima kasih atas persetujuannya dan syukur *alhamdulillah*, mudah-mudahan ini dapat naik ke tingkat II dalam waktu yang tidak lama lagi.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan.
Dengan demikian dari pihak Pemerintah pun sudah setuju.

(RAPAT: SETUJU)

**Para Anggota Komisi I DPR RI,
Kemudian yang mewakili Pemerintah.**

Dengan demikian di dalam Rapat Kerja ini antara Pemerintah dengan DPR RI sudah ada kesepakatan. Namun demikian, tetap saya tanyakan kepada rekan-rekan dari Komisi I DPR RI apakah betul-betul kita setuju kepada kedua Rancangan Undang-Undang tersebut?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah Pak Menteri, sebagai penutup nanti kita sangat berharap kita akan menandatangani nota kesepakatan. Namun demikian, kalau masih ada kesan-kesan atau pesan-pesan dari Pemerintah Bapak Menteri Pertahanan atau darimana silakan. Kalau masih ada Pak, kalau tidak kita lanjutkan.

Terima kasih Pak, dengan demikian Rapat Kerja kita tutup. Kita ucapkan terima kasih kepada perwakilan Pemerintah, Bapak Menteri Pertahanan, kemudian Menkumham diwakili oleh Bapak Bunyamin, kemudian Ibu Menlu diwakili oleh Dr. Damospali.

Terima kasih kepada seluruh jajaran termasuk para Sekjen, Dirjen, semuanya, mudah-mudahan ini adalah awal yang baik.

Dengan demikian Rapat Kerja kita tutup, kemudian kita lanjutkan dengan penandatanganan naskah.
Terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.28 WIB)

Jakarta, 4 Desember 2018
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001